

## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

- Adjie, Habib, (2015). *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*. Cetakan Kesatu. Bandung. Refika Aditama.
- Adjie, Habib. (2017). *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2016). *Lembaga Kenotariatan Indonesia perspektif hukum dan etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Effendy, Muhadjir. (2016). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka.
- Hardiyansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Harsono, B. (2015). *Hukum agraria indonesia*. Buku Dosen-2014.
- Harsono, Boedi. (2014). *Hukum Agraria Indonesia & Himpunan Peraturan- Peraturan Hukum Tanah*. Djambatan; Jakarta.
- Hartini, L. (2019). *Bahasa dan produk hukum*. Bandung. Refika Aditama.
- HS, H. S., & Sh, M. S. 2021. *Peraturan jabatan notaris*. Sinar Grafika.
- Ibrahim, D.J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media Grup.
- Ishaq, I. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung. Alfabeta
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Kadarudin. (2021). *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci.

Muhamin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Pers.

Muhammad Syahrur, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.

Pnh Simanjuntak, S. H. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. Prenadamedia Group.

Rahayu, D. D. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Salim Rahman, Sufirman. (2023). *Hukum dalam Jual Beli Tanah*. Aceh: Sefa Media Utama.

Sasongko, Wahyu, (2011). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Setiawan, I Ketut Oka. (2019). *Hukum Pendaftaran Tanah & Hak Tanggungan*, Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika

Sugiharto, Umar Said. (2015). *Hukum Pengadaan Tanah*. Setara Press; Malang. Suharsini, A. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sulhan. (2018). *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Cetakan Pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media

Umar, H. (2013). *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Zainudin, A. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## ARTIKEL DALAM JURNAL

- Asril, Juli. (2020). Beberapa Permasalahan Terkait Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah. *JIMEA*, Vol. 4 No. 2.
- Aulia, Fikri, (2021). Implementasi Bantuan Hukum Oleh Notaris Secara Cuma- Cuma Kepada Orang yang Tidak Mampu. *Officium Notarium*, No.2 Vol. 1.
- Azizah, Nur dkk. (2022). Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik (Studi di Kantor PPAT Wilayah Banjarmasin Utara). *Notary Law Journal* Vol. 1 Issue 2.
- Bisyir, Dzaky Alwan. (2023). Problematika Dalam Pelaksanaan Hak Tanggungan Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. *Privat Law* Vol. 11 No. 1.
- Candra, G., Gautomo, K. I., & Pangestu, M. D. A. 2022. Hukum Waris Pada Perkawinan Beda Agama Menurut Pluralisme Hukum Waris di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(2), 71-83.
- Candra, I Nyoman Wira, dkk. (2023). Bentuk Pelanggaran Hukum Dan Penegakan Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Risalah Kenotariatan* Volume 4, No. 1.
- Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. 2021. Kekuatan Hukum Akta Jual Beli yang Dibuat Oleh Camat dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 75 2016 Tentang Peraturan Jabatan PPAT. *Jurnal*

Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(3), 905-916.

Djadjuli, R. Didi. (2019). E-Government Dalam Merealisasikan Pelayanan yang Berkualitas. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* Vol.6No.4.

Filano, Argi Putra. (2023). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik di Kota Padang. *Swara Justisia* Vol 7, Issue 2.

Hutasoit, B., Adnyani, N. K. S., & Dantes, K. F. (2021). Eksistensi Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kantor Notaris Di Kota Singaraja). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 405-415.

Korompis, Syendy A. (2018). Pengaturan Hukum Tentang Pendaftaran Tanah Menjadi Hak Milik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. *Lex Privatum* Vol. VI/No. 1.

Mahesa, K. H., Setianto, M. J., & Dantes, K. F. (2023). Perlindungan Hukum Dalam Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4),115-124.

Nurdin, Stiawan. (2022). Efektifitas Pelayanan Hak Tanggungan Secara Elektronik Yang Dilakukan Oleh PPAT Dan Kreditur (BANK) (Studi Kasus pada PPAT Junaidi, SH.,M.Kn dan PT. BPR. Segara Anak Kencana). *Juridica* - Volume 4, No. 1.

Riswanti, I. (2022). Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Jurnal Ilmu*

*Hukum*, Volume 2 No. 1.

Sagari, Damar dkk. (2022). Efektivitas Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 5 No.1.

Sekti, Ellena Balqis. (2022). Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Melakukan Pendaftaran Hak Tanggungan Berbasis Elektronik. *Notarius*, Volume 15 Nomor 2.

Setyaningsih, dkk. (2018). Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Terhadap Perjanjian Kredit Antara Kreditur Dan Debitur Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Purwokerto. *Jurnal Akta*, Vol. 5 No. 1.

Suardi, Elfazahra dkk. (2022). Penerapan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Binjai. *Jurnal Rectum*, Vol. 4, No. 2.

Taolin, Fitriana Trinengsi dkk. (2024). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah. *Tunas Agraria*, Vo. 7 No. 1.

Usman, R. 2018. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Dengan Akta. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 223-235.

## **SKRIPSI**

Fatimah, S. 2021. Efektivitas Pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik (HT-el) di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. (*Skripsi*).Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.

Prasetyo, A. D. 2020. Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) dalam Pendaftaran Jaminan Hak Tanggungan. (*Skripsi*). Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Negara Republik

Indonesia. Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembar Negara. 1960/No. 104, Tambahan Lembaran Negara No. 2043.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Lembaran Negara. 1996.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara. 1997 No. 59.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara. 2014/No. 3, Tambahan Lembaran Negara No. 5491.

Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara. 2016/NO.120, Tambahan Lembaran Negara NO.5893.

Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. BN.2020/No. 349.